ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris".

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Jombang serta bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan data dari berkas putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dan putusan Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan, hasil penelitian kemudian dianalisis menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini berawal dari gugatan penggugat yang merasa hak warisnya tidak mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Penggugat adalah ahli waris dari Siti Musibah, istrinya. Pewaris wafat dengan meninggalkan harta bersama dengan Sarman Hadi dan sebagiannya adalah harta waris bagi Sarman serta anak-anaknya. Dari proses pembuktian, semua bukti menyatakan bahwa setengah dari harta peninggalan adalah hak gono gini Sarman dan selebihnya hak waris Sarman dan anak-anaknya. Dari pembuktian tersebut, putusan PA Jombang membagi harta warisan sebagaimana hukum Islam dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Namun, PA Jombang kurang cermat, karena menolak eksepsi tergugat lantaran Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh, anak perempuan Sarman yang berusia 16 tahun tidak dijadikan pihak yang berperkara, tetapi diwakilkan oleh saudara perempuannya. Putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Jombang dengan menggunakan dasar hukum yang lalai digunakan PA Jombang yaitu, dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Hakim PTA berpendapat bahwa anak di bawah umur diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup, maka tidak sah perwalian oleh saudara perempuan tanpa ada putusan pengadilan yang mencabut perwalian orang tua tersebut.

Putusan PTA Surabaya lebih tepat dengan konteks hukum Indonesia karena menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang tentang Perkawinan dan yurisprudensi, senada pula dengan Kompilasi Hukum Islam dan *burgerlijk wetboek* sebagai acuan yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kepada hakim disarankan untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal terhadap suatu putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id